MEMPERTANYAKAN SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H., M.H.[1], Dwi Gustiani Fazsah Siregar, S.H.[2]

[1]Analis Perkara Peradilan pada PTUN Jakarta
Email: dzikri522@gmail.com

[2]Analis Perkara Peradilan pada PTUN Jakarta
Email: dwigustianifzsh@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.55292/caztmy98

Abstrak

Konsep *electoral justice* yang dilegitimasi dalam kerangka hukum Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah menentukan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, dikehendaki bahwa Putusan PTUN bersifat final dan mengikat sehingga berkonsekuensi langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Namun ironisnya, praktik empiris terkini pada penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN Jakarta justru malah memperlihatkan kontradiksinya, sehingga perlu dipertanyakan sifat final dan mengikat tersebut. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, artikel ini bertujuan untuk mendiskursuskan terlebih dahulu bagaimanakah makna dari sifat final dan mengikat Putusan PTUN

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dalam sengketa proses Pemilu, untuk selanjutnya menemukan implikasi dari norma pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengenai sifat final dan mengikat Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu terhadap praktiknya di PTUN Jakarta. Secara konklusif, hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa konsekuensi yuridis dari makna final dan mengikat putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu adalah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh. Selanjutnya sebagai sebuah refleksi kritis, artikel ini menemukan bahwa ketidaktegasan dan ketidakjelasan norma pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu mengenai sifat final dan mengikatnya Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu, memiliki implikasi yang sangat berarti sebagaimana yang terlihat dalam praktiknya di PTUN Jakarta.

Kata Kunci: Final dan Mengikat; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Abstract

The electoral justice concept that is legitimazed within the electoral legal framework in Indonesia has determined a mechanism for resolving electoral process disputes through the State Administrative Court in the stage of determining the Election Contesting Political Parties, determination of the Final List of Candidates for Members of The House of Representative, Regional Representative Council, and the determination of the Presidential and Vice Presidential Candidate Pairs. In the resolving the dispute, it is desired that the State Administrative Court Decision be final and binding so that the immediate consequences have permanent legal force (inkracht) and cannot take any legal action. However, ironically, the current empirical practice on electoral process dispute at the Jakarta State Administrative Court actually shows contradictions, so it is necessary to question its final and binding nature. As a normative legal research

with statutory, case, and conceptual approaches, this article aims to first discourse the meaning of the final and binding nature of the State Administrative Court Decision in the electoral process disputes, to further determine whether the implications of regulatory norms in Law Number 7 of 2017 concerning Elections regarding the final and binding nature of the State Administrative Court Decision in the electoral process disputes. Conclusively, the results of the research in this article show that the juridical consequence of the final and binding nature of the State Administrative Court Decision in the electoral process disputes is that they immediately acquire permanent legal force (inkracht) from the moment they are pronounced and there are no legal actions that can be taken. Furthermore, as a critical reflection, this article finds that the lack of clarity of regulatory norms in the Election Law regarding the final and binding nature of the State Administrative Court Decision in the electoral process disputes, has very significant implications as seen in practice at the Jakarta State Administrative Court.

Keywords: Final and Binding; State Administratif Court Decision; Electoral Process Disputes.

Latar Belakang

Kerangka hukum Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang melegitimasi konsep "*electoral justice*" telah menentukan mekanisme dan proses penyelesaian terhadap pelanggaran dan sengketa yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Pemilu.[1] Dalam konteks ini, permasalahan hukum Pemilu yang secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori besar pelanggaran dan sengketa Pemilu, terbagi ke dalam beberapa segmentasi dalam proses penegakan hukumnya. Secara normatif, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengklasifikasikannya ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu: (1)

[1] Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi, "Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum", *Jurnal APHTN-HAN Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022*, hlm. 93.

pelanggaran tindak pidana Pemilu[2], (2) pelanggaran administratif Pemilu[3], (3) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu[4], (4) sengketa proses Pemilu[5], (5) sengketa tata usaha negara Pemilu[6], dan (6) perselisihan hasil Pemilu[7]. Hal mana terhadap setiap jenis pelanggaran dan sengketa Pemilu tersebut, telah diatur bagaimana cara mengajukan gugatan/laporan/pengaduan, lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikannya, serta berapa lama batasan waktu dalam penanganan dan penyelesaian setiap jenis pengaduan/laporan/gugatan itu.[8]

---

[2] Yaitu "*tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu*".

[3] Pasal 460 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikannya sebagai "*pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu*", dan Pasal 461 menentukannya menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya.

[4] Pasal 456 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikannya sebagai "*pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu*", dan Pasal 457 menentukannya menjadi kewenangan DKPP untuk menyelesaikannya.

[5] Pasal 466 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikannya sebagai "*sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*". Adapun berdasarkan Pasal 467, 468, dan 470, ditentukan bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Pengadilan Tata Usaha Negara.

[6] Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikannya sebagai "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*"dan menentukannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

[7] Pasal 473 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikannya sebagai "*perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dalam hal penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Adapun dalam hal penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*". Berdasarkan Pasal 474 dan 475, ditentukan bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi.

[8] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pemilihan Umum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hlm. 43.

Dari segmentasi proses penegakan hukum Pemilu tersebut, secara limitatif diskursus pembahasan dalam artikel ini akan terfokus pada sengketa proses Pemilu atau sengketa tata usaha negara Pemilu yang memberikan kewenangan penanganan dan penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu telah menentukan klasifikasinya ke dalam 3 (tiga) jenis tahapan, yaitu pada saat penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, pada saat penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pada saat penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.[9] Ketiganya ditujukan kepada mereka yang dinyatakan tidak lolos verifikasi dan tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Perihal penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat hal unik dan menarik yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini, yaitu Putusan PTUN yang dikehendaki bersifat final dan mengikat langsung pada pengadilan tingkat pertama dan tentunya juga menjadi yang terakhir. Hal demikian sebagaimana Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan, "*Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*". Sebagai peraturan pelaksanaannya, kemudian Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, memberikan penegasan norma terhadap sifat final dan mengikat putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu dimana Pasal 13 ayat (5) menegaskan, "*Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali*".

[9] Lihat Pasal 470 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Secara sederhana, dari ketentuan normatif tersebut tentu dapat dengan mudah dipahami bahwa putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang dikehendaki langsung bersifat final dan mengikat memiliki konsekuensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Terhadap putusan tersebut, tentu tidak dimungkinkan untuk diajukannya upaya hukum apapun. Namun ironisnya, praktik empiris yang terjadi dewasa ini pada penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 justru malah memperlihatkan kontradiksinya. Hal mana terhadap putusan PTUN Jakarta dalam sengketa proses Pemilu berkenaan dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang baru saja berlalu, diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh 3 (tiga) Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi sehingga tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.[10] Kondisi inilah yang kemudian menjadi perlu dipertanyakan bagaimana dengan sifat "final dan mengikat" tersebut yang dalam realitanya tidaklah final. Sehingga, atas dasar hal tersebut penulisan artikel ini menjadi menarik dan memiliki daya tariknya tersendiri mengingat kekinian kondisi serta kebaruan solusi dan pemikiran yang ditawarkan.

Secara kontradiktif, kondisi seperti ini tentu saja hanya akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak mengingat sifat "final dan mengikat" putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu sejatinya mengarah pada keinginan untuk segera mengakhiri sengketa dan mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan. Dengan demikian, sejak saat diucapkannya dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum

[10] Sengketa proses Pemilu tersebut sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022. Adapun uraian selengkapnya mengenai pokok sengketa dan pengajuan upaya hukumnya akan disajikan pada poin pembahasan dalam artikel ini.

tetap (*inkracht*) dan oleh karenanya tidak ada lagi kesempatan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum apapun termasuk Peninjauan Kembali. Tidak adanya upaya hukum lebih lanjut ini sesungguhnya bertujuan agar putusan tersebut dapat langsung menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum dengan cepat sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Selain itu, juga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang mengharuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan cepat mengingat dalam setiap tahapan-tahapan penyelenggaraannya terikat dengan jadwal dan waktunya masing-masing.

Penulisan artikel ini akan diawali dengan diskursus teoretis mengenai sifat final dan mengikatnya suatu putusan pengadilan. Dalam diskursus ini, akan dipadukan makna etimologis dan terminologis frasa "final dan mengikat" sifat suatu putusan pengadilan dengan pandangan para ahli (doktrin) dan ketentuan normatifnya dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, artikel ini akan mendiskursuskan praktik empiris penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN Jakarta baik pada penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019 yang sudah berlalu, maupun yang kini sedang berjalan pada penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 termasuk dalam hal pengajuan upaya hukumnya. Secara dialektis dengan mengacu pada diskursus teoretis dan praktik empirisnya, artikel ini selanjutnya akan memberikan refleksi kritis atas praktik pengajuan upaya hukum terhadap putusan PTUN Jakarta dalam sengketa proses Pemilu yang dikehendaki bersifat final dan mengikat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan saran perbaikan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di masa-masa yang akan datang.

Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak penulis kaji dan temukan jawabannya dalam artikel ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah makna dari sifat final dan mengikat Putusan PTUN dalam Sengketa Proses Pemilu; *Kedua*, bagaimanakah implikasi dari norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sifat final dan mengikat Putusan PTUN dalam Sengketa Proses Pemilu terhadap praktik penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN Jakarta.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, serta literatur hukum lainnya dalam kepustakaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebagai bahan hukum sekunder. Adapun alat pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah studi dokumen atau literatur kepustakaan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif. Sedangkan tipologi penulisan artikel ini bersifat preskriptif-analitis yang akan memadukan diskursus teoretis dengan praktik empiris mengenai sifat final dan mengikat Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu dan pengajuan upaya hukum terhadapnya, untuk selanjutnya merefleksikan secara kritis dalam rangka perbaikan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya.

Dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang sedang dikaji, penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melihat secara empiris praktik penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN Jakarta dan

memahami *ratio decidendi* Putusan PTUN Jakarta dalam kasus-kasus sengketa proses Pemilu yang diajukan kepadanya, serta melihat praktik empiris pengajuan upaya hukum terhadapnya yang mana baik secara teoretis maupun normatif Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Selain itu, penulisan artikel ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam membangun suatu konsep hukum mengenai sifat final dan mengikat suatu putusan pengadilan dengan berdasar pada pandangan para ahli atau doktrin hukum. Hal-hal demikian dilakukan dalam rangka memperkuat argumentasi hukum yang penulis bangun sebagai upaya menemukan jawaban dan memecahkan persoalan yang sedang penulis tangani dalam penulisan artikel ini.

Diskursus Teoretis Sifat Final dan Mengikat suatu Putusan Pengadilan

Secara etimologis, jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "final" bermakna tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan kata "mengikat" bermakna menguatkan (mencengkam).[11] Bertolak dari makna etimologis tersebut, maka secara terminologis kata "final" dapat dimaknai bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir, sedangkan kata "mengikat" dapat bermakna memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Jika dikaitkan dengan sifat final dan mengikat suatu putusan pengadilan, maka dapat bermakna bahwa telah ada kepastian hukum atas suatu sengketa dan oleh karenanya tertutuplah segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum lainnya.[12] Selaras dengan hal

[11] Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2001), hlm. 317.

[12] Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, *Volume 6*, *Nomor 1*, *April 2009*, hlm. 81-82.

tersebut, Bambang Sutiyoso memaknai putusan final sebagai sebuah putusan yang merupakan upaya pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.[13]

Berbicara mengenai sifat final dan mengikat suatu putusan pengadilan, dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dikehendaki bersifat final dan mengikat. Hal ini sebagaimana ditegaskan secara normatif dalam Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang berbunyi: "*Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*."[14] Sebagai peraturan pelaksananya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PERMA 5/2017) mempertegas kembali sifat final dan mengikat tersebut pada Pasal 13 ayat (5) yang berbunyi: "*Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali*."[15]

Dari ketentuan normatif tersebut dikaitkan dengan makna etimologis dan terminologis sifat final dan mengikat suatu putusan pengadilan, dapat ditarik suatu benang merah bahwa putusan PTUN pada sengketa proses Pemilu yang dikehendaki bersifat final dan mengikat, sesungguhnya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta tidak ada upaya hukum

---

[13] Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 160.

[14] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 471 ayat (7).

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 13 ayat (5).

apapun yang dapat ditempuh setelahnya, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.[16] Secara yuridis, ketentuan mengenai sifat final dan mengikatnya putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu memiliki konsekuensi bahwa putusan PTUN tersebut langsung mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas. Secara konseptual, konsekuensi dan akibat hukum dari putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat antara lain yaitu: (1) terwujudnya kepastian hukum, (2) dapat langsung dilakukannya eksekusi, dan (3) bersifat memaksa, yaitu memaksa semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk badan-badan peradilan sehingga terikat untuk melaksanakan putusan sebagaimana mestinya.[17]

Dalam diskursus teoretis, terhadap keberlakuan putusan PTUN itu sendiri melekat sifat *erga omnes*, yang artinya berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan itu, Bagir Manan berpendapat bahwa putusan *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibat hukumnya berlaku juga bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.[18] Sedangkan Philipus M. Hadjon memandang asas *erga omnes* sebagai asas yang merupakan sifat kekuatan mengikat dari putusan PTUN yang pada dasarnya adalah untuk menegakkan hukum publik yaitu hukum administrasi yang mana sifat dari hukum publik itu adalah berlakunya untuk umum dan mengikat bagi siapapun.[19] Dari dialektika teoretis konseptual tersebut, terlihat makna *erga*

---

[16] Fajar Laksono, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. 4.

[17] Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan tentang DKPP untuk Penegakan Hukum", disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013.

[18] Lihat dalam Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial*, *Volume 14*, *Nomor 3*, *Desember 2021*, hlm. 298.

[19] Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesia Administrative Law*)", (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), hlm 313.

omnes sebagai suatu kekuatan hukum dari Putusan PTUN yang bersifat mengikat bagi siapapun, baik terhadap pihak-pihak yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa.

Konsepsi teoretis demikian sejatinya berangkat dari konsep sengketa tata usaha negara itu sendiri yang dalam diskursus hukum administrasi negara termasuk ke dalam sengketa hukum publik yang menyangkut pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN. Oleh karena sengketa TUN merupakan sengketa hukum publik, maka putusan hakim PTUN pada dasarnya memiliki sifat atau karakteristik hukum publik sehingga tidak hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara. Berbeda halnya dengan putusan hakim perdata yang hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara mengingat sifat dan karakteristik privat dari sengketa perdata itu sendiri antara kedua belah pihak (*inter partes*). Dengan demikian, putusan hakim PTUN bersifat *erga omnes* yang mengikat semua pihak termasuk pihak-pihak yang tidak berperkara sekalipun.[20] Sifat *erga omnes* dari putusan hakim PTUN ini juga dikarenakan, baik subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) maupun objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) memiliki sifat atau karakteristik hukum publik, sehingga hakim dalam diktum putusannya menyatakan agar pihak-pihak tertentu, baik yang diikutsertakan pada salah satu pihak maupun yang tidak, untuk mentaati putusan pengadilan (PTUN) tersebut.[21]

Perihal putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu, dikaitkan dengan sifat aslinya yang *erga omnes*, sesungguhnya semakin memperkuat konsekuensi, akibat hukum, dan kekuatan hukum putusan PTUN tersebut yang seketika langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkannya

[20] Antoni Putra, *Op. cit*., hlm. 298.

[21] Widodo Ekatjahjana, "Mencermati Ratio Decidendi MK dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN", *Jurnal Konstitusi*, *Volume 7*, *Nomor 5*, *Oktober 2010*, hlm. 10.

dalam sidang terbuka untuk umum sehingga tidak dimungkinkan adanya pengajuan upaya hukum apapun di samping putusannya yang bersifat mengikat bagi siapapun. Kendati demikian, perihal sifat final dan mengikatnya suatu putusan pengadilan, ada pandangan berbeda yang mengatakan bahwa terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat, hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.[22] Hal demikian mengingat diferensiasinya dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuannya. Sehingga, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait dengan persyaratan formal adanya tenggang waktu tertentu setelah putusan tersebut diketahui oleh para pihak.[23]

Adapun perihal peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, sejatinya bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil sehingga tidak dapat dibatasi oleh waktu atau suatu ketentuan formalitas.[24] Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu wadah bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan atas dasar ditemukannya *novum* (fakta atau keadaan baru yang substansial yang ditemukan setelah suatu proses hukum selesai dilakukan) ataupun karena kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.[25] Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dapat diperbaiki.[26] Konsep demikian

---

[22] Lihat M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, *Volume 12*, *Nomor 2*, *Juni 2015*, hlm. 339.

[23] *Ibid*.

[24] *Ibid*.

[25] Antoni Putra, *Op. cit*., hlm. 303.

[26] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 168.

selaras dengan konsep peninjauan kembali sebagai koreksi putusan demi keadilan (*corrective justice*).[27] Dalam hal ini, peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).[28]

Dari serangkaian uraian mengenai diskursus teoretis tersebut di atas, artikel ini selanjutnya akan melihat secara empiris praktik pengajuan upaya hukum terhadap putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang terjadi dewasa ini. Mengingat sebagaimana telah terurai bahwa secara teoretis dan konseptual putusan *a quo* telah final dan mengikat, namun dalam praktiknya masih dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang merasa belum puas. Padahal, jika dicermati dengan seksama mengacu pada UU 7/2017, PERMA 5/2017, serta pendapat ahli terkait sifat "final dan mengikat" Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang sejatinya haruslah dianggap sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pengajuan upaya hukum apapun termasuk Peninjauan Kembali tidaklah dapat dibenarkan. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu sejatinya telah mengingkari sifat final dan mengikat serta sifat *erga omnes* dari putusan PTUN itu sendiri. Hal ini tentu saja hanya akan menyebabkan ketidakpastian hukum atas putusan PTUN tersebut.

---

[27] Irhamto, dkk., "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Agung terhadap Diterima dan Dikabulkannya Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016 serta Penerapan Upaya Hukum Keputusan Fiktif Positif di PTUN dikaitkan dengan Implikasinya terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Doctrinal*, *Volume 8*, *Nomor 1*, *Maret 2023*, hlm. 100.

[28] Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Puslitbang Kejagung RI, 2006), hlm. 8. Lihat juga dalam Ristu Darmawan, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 22.

Praktik Empiris Pengajuan Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Proses Pemilu

Dalam konteks terkini pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, khususnya pada tahapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang baru berlalu, terhadap Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022[29], diajukan gugatan pada PTUN Jakarta oleh beberapa partai politik calon peserta Pemilu yang dinyatakan tidak lolos verifikasi sehingga tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan data perkara sebagai berikut:

[29] Dalam perkembangannya, Keputusan KPU 518/2022 telah diubah dengan Keputusan KPU 551/2022 pasca Putusan Bawaslu RI Nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang pada intinya menetapkan dan menambahkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024.

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Amar Putusan
1.	4/G/SPPU/2023/ PTUN.JKT	Partai Masyumi	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
2.	5/G/SPPU/2023/ PTUN.JKT	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (PERKASA)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
3.	25/G/SPPU/2023/ PTUN.JKT	Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
4.	181/G/SPPU/2023/ PTUN.JKT	Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA)	KPU RI	Berita Acara Nomor 645/ PL.01.1-BA/05/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Keanggotaan Terhadap Hasil Analisa Potensi Ganda Dan Potensi Tidak Memenuhi Syarat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 16 April 2023	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

5.	455/G/SPPU/2022/PTUN.JKT	Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
6.	456/G/SPPU/2022/PTUN.JKT	Partai Republik	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
7.	463/G/SPPU/2022/PTUN.JKT	Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
8.	464/G/SPPU/2022/PTUN.JKT	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
9.	468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT	Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022	Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

Sumber: Data Diolah Penulis dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTU

Uniknya, dari 9 (sembilan) perkara yang terklasifikasi sebagai Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) pada tahapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana terurai dalam tabel di atas, terdapat 3 (tiga) perkara yang dimohonkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:[30]

1. Perkara Nomor 455/G/SPPU/2022/PTUN.JKT

Dalam *ratio decidendi*-nya, Majelis Hakim pada perkara Sengketa Proses Pemilu Nomor 455/G/SPPU/2022/PTUN.JKT menilai bahwa Penggugat (Partai Keadilan dan Persatuan) tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) langsung dengan objek sengketa karena sebelumnya telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilu pada saat mengikuti verifikasi administrasi perbaikan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI, yang tertuang dalam Pengumuman Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia, tertanggal 18 November 2022. Sebagai konsekuensinya, Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat langsung dari diterbitkannya objek sengketa sehingga dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara.[31] Atas dasar *ratio decidendi* tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa

[30] Dalam perkembangannya yang paling mutakhir, sampai saat penyusunan artikel ini, ketiga perkara yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim PK di Mahkamah Agung dan masih menunggu adanya Putusan.

[31] Lihat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 455/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, hlm. 154.

gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima.

Terhadap Putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2023 tersebut, kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum PK kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023. Dalam Memori PK-nya, Penggugat/Pemohon PK mendalilkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim dinilai telah mengesampingkan *legal standing* Penggugat/Pemohon PK yang dahulu disebut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sudah ikut Pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 dan sudah memiliki anggota legislatif di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga jelas memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang nyata dengan Keputusan, Pengumuman, Berita Acara, atau seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon PK (KPU RI).[32] Lebih lanjut, didalilkan juga bahwa sejatinya Penggugat/Pemohon PK mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa karena terbitnya keputusan objek sengketa *a*

[32] Dalam dalil permohonannya, Penggugat/Pemohon PK menilai bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hakim hanya sepihak pada tahap verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tetapi tidak melihat dari sudut pandang sosial dan yuridis secara menyeluruh yang berdampak pada kepentingan Penggugat/Pemohon PK yang dirugikan, seperti misalnya kesinambungan wadah anggota legislatif di DPRD Provinsi sebanyak 4 (empat) kursi dan di DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) kursi, dengan total sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kursi yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, Penggugat/Pemohon PK juga mendalilkan bahwa selalu lolos verifikasi administrasi dan faktual dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Hanya saja pada penyelenggaraan Pemilu kali ini, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dimiliki oleh Tergugat/Termohon PK tidak memadai secara administrasi sehingga tidak dapat menindaklanjuti problem kegandaan anggota antar partai politik sebagaimana yang dialami oleh Penggugat/Pemohon PK. Secara sekuensial, Penggugat/Pemohon PK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada proses verifikasi administrasi dan tidak dapat dilanjutkan dalam tahapan berikutnya yaitu verifikasi faktual. Lihat dalam Memori PK yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023, hlm. 7-8.

quo berawal dari proses administrasi pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang wajib bagi Partai Non Parlemen. Sedangkan Penggugat/Pemohon PK senyatanya sudah ikut Pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 dan sudah mempunyai anggota legislatif di berbagai daerah.[33]

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat/Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara PK a quo agar memberikan amar putusan yang pada intinya adalah menerima permohonan PK dari Pemohon PK, membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 455/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2023, serta memerintahkan kepada Tergugat/Termohon PK untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat/Pemohon PK sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024.

2. Perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT

Majelis Hakim pada Perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT melalui pertimbangan hukumnya menilai bahwa hubungan *causal verband* antara Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) dengan objek gugatan tidaklah bersifat langsung, melainkan hubungan *causal verband* yang bersifat langsung sejatinya adalah antara Penggugat dengan 3 (tiga) Berita Acara Tergugat (KPU RI) mengenai rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi administrasi perbaikan partai politik calon peserta Pemilu yang mana pada status akhirnya menyatakan bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS).[34] Berdasarkan

[33] *Ibid*, hlm. 49.

[34] Ketiga Berita Acara tersebut yaitu (1) Berita Acara Nomor 197/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, (2) Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dan (3) Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Lihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 468/G/

fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa penerbitan objek gugatan dilakukan oleh Tergugat setelah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang Memenuhi Syarat (MS) pada verifikasi administrasi, sedangkan terhadap partai politik yang telah dinyatakan TMS pada verifikasi administrasi, termasuk Penggugat, tidak dilakukan verifikasi faktual. Oleh karena Penggugat tidak mengikuti verifikasi faktual, maka Majelis Hakim menilai secara limitatif bahwa Sengketa Proses Pemilu sejatinya hanyalah bagi partai politik yang telah mengikuti verifikasi baik administrasi maupun faktual. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dengan objek gugatan sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek gugatan dan juga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara.[35] Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim melalui amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

Terhadap putusan PTUN Jakarta *a quo* tertanggal 19 Januari 2023, pada tanggal 2 Februari 2023 Penggugat mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, Penggugat/Pemohon PK mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara SPPU Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) karena telah melanggar asas keadilan bagi Penggugat/Pemohon PK dimana penerbitan objek sengketa sejatinya tidak terlepas dari seluruh rangkaian peristiwa hukum yang saling menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan

SPPU/2022/PTUN.JKT, hlm. 168.

[35] *Ibid*, hlm. 172.

sebelum diterbitkannya objek sengketa.[36] Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat/Pemohon PK juga mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa sejatinya didasarkan pada hasil verifikasi administrasi partai politik yang mengacu pada Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang mana kedua berita acara tersebut dihasilkan dari proses verifikasi administrasi yang melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.[37]

Atas dasar uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat/Pemohon PK memohon kepada Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim PK untuk menerima dan memeriksa permohonan PK dari Pemohon PK, serta memutus dengan amar putusan yang pada intinya adalah menerima dan mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK, membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2023, menyatakan batal keputusan objek sengketa dan memerintahkan Tergugat/Termohon PK untuk mencabutnya, serta memerintahkan Tergugat/Termohon PK untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Penggugat/Pemohon PK sebagai Partai

---

[36] Lihat dalam Memori PK dari Pemohon PK Partai Rakyat Adil Makmur yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023, hlm. 9.

[37] Dalam hal ini, Penggugat/Pemohon PK mendalilkan bahwa Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sejatinya telah dibatalkan berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Sedangkan Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang diterbitkan kemudian, didalilkan tidak sesuai dengan amar Putusan Bawaslu RI *a quo* sehingga membuktikan bahwa verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon PK telah dilakukan secara tidak cermat, tidak profesional, dan tidak teliti. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 48-50.

Selain itu, Penggugat/Pemohon PK juga mendalilkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dijadikan dasar oleh Tergugat/Termohon PK untuk melakukan verifikasi administrasi partai politik penuh dengan beragam permasalahan. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 54-56. Di samping itu, formil objek sengketa juga didalilkan tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 karena keputusan objek sengketa *a quo* tidak memuat atau tidak disertai dengan Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang berisi Partai Politik yang Memenuhi Syarat (MS) dan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (3) *Jo*. Pasal 136 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Lihat *Ibid*, hlm. 50-53.

Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

3. Perkara Nomor 4/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Dalam perkara SPPU Nomor 4/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam Sengketa Proses Pemilu, yang dapat dikategorikan sebagai Penggugat adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi, yang mana verifikasi yang dimaksud adalah berdasarkan pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan rekapitulasi hasil verifikasi faktual.[38] Sementara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum mengikuti tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang dirugikan sebagai akibat langsung dari diterbitkannya objek sengketa, yang secara sekuensial Penggugat juga dinilai tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.[39] Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima.

Terhadap putusan tertanggal 2 Februari 2023 tersebut, Penggugat pada tanggal 16 Maret 2023 mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta dengan alasan adanya bukti baru (*novum*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST tertanggal 2 Maret 2023 yang mana berdasarkan amar putusannya Tergugat/Termohon PK dinyatakan telah melakukan "perbuatan melawan hukum" dalam proses verifikasi administrasi partai

[38] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, hlm. 92.

[39] *Ibid*, hlm. 96.

politik calon peserta Pemilu.[40] Selain itu, Penggugat/Pemohon PK juga mendalilkan adanya kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon PK berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan *judex factie* yang dinilai tidak sesuai dengan realitanya.[41] Di samping itu, Penggugat/Pemohon PK juga mendalilkan adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex factie* berkenaan dengan kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang harus didahului adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*) serta pertimbangan hukum mengenai hal-hal lainnya yang terungkap pada persidangan *judex factie* di PTUN Jakarta.[42]

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat/Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk memutus dan menetapkan hal-hal yang pada pokoknya adalah menerima permohonan PK dari Pemohon PK untuk seluruhnya, menyatakan batal Putusan PTUN Jakarta Nomor 4/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tertanggal 2 Februari 2023, menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, serta menetapkan Penggugat/Pemohon PK sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

---

[40] Dalam dalil-dalil permohonannya, Penggugat/Pemohon PK mendalilkan beberapa perbuatan Tergugat/Termohon PK yang dapat dikategorikan sebagai "perbuatan melawan hukum" yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pemohon PK, diantaranya adalah memberikan akses SIPOL kepada partai politik sebelum penetapan dan pengundangan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan/atau sebelum pembukaan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dan menjadikan SIPOL sebagai satu-satunya instrumen pokok untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik padahal sebenarnya tidak diperintahkan oleh UU 7/2017 dan juga tidak sesuai dengan beberapa Putusan Bawaslu RI. Lihat dalam Memori PK dari Pemohon PK Partai Masyumi yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023, hlm. 11-13.

[41] *Ibid*, hlm. 13-15.

[42] *Ibid*, hlm. 18-28.

Secara refleksif, praktik empiris pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang telah final dan mengikat sejak saat diucapkannya dalam sidang terbuka untuk umum, selain memperlihatkan keunikan juga memperlihatkan adanya kemunduran pemahaman terhadap makna sifat "final dan mengikat" Putusan PTUN dalam SPPU dari partai politik calon peserta Pemilu yang dinyatakan tidak lolos verifikasi dan tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024. Hal ini mengingat jika disandingkan dengan praktik empiris pada penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019 yang telah berlalu, baik pada tahapan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu maupun pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota[43], terdapat keseragaman pemahaman dari mereka yang dinyatakan tidak lolos lalu mengajukan gugatan SPPU kepada PTUN Jakarta, untuk mematuhi putusan dan tidak mengajukan upaya hukum apapun termasuk Peninjauan Kembali. Praktik empiris tersebut dapat dilihat dalam data yang telah penulis sajikan sebagai berikut:

[43] Secara normatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, kedua tahapan tersebut terklasifikasi sebagai Sengketa Proses Pemilu yang mana upaya penyelesaian terhadapnya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Amar Putusan
1.	53/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2.	54/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Partai Swara Rakyat Indonesia	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3.	56/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

		Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia)		KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	
4.	57/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Partai Rakyat	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
5.	59/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

6.	60/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Partai Republik	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
7.	61/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

8.	227/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	dr. Edi Prasetyo, SP.S, dkk (Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019)	KPU RI	Keputusan KPU Nomor 1072/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1024/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/ 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 diperkuat dengan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/ KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
9.	242/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	Dr. (HC) Oesman Sapta Odang (Calon Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019)	KPU RI	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/ KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

10.	254/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT	H. Abdul Hafid Achmad (Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019)	KPU RI	Keputusan KPU Nomor 1129/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
11.	39/G/SPPU/2019/ PTUN.JKT	Drs. H. Moh. Arief, M.M., M.Pd. (Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019)	KPU Provinsi DKI Jakarta	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 68/PL.01.4-Kpt/31/ Prov/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perubahan atas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu Tahun 2019	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Sumber: Data Diolah Penulis dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta

Refleksi Kritis Pengajuan Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Sengketa Proses Pemilu

Sebagaimana telah terurai secara dialektis dalam diskursus pembahasan sebelumnya, bahwa konsekuensi yuridis dari putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang dikehendaki bersifat "final dan mengikat" adalah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh. Secara analogis, sifat "final" putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu sama dengan sifat "final" putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam sifat "final" tersebut mencakup pula kekuatan hukum "mengikat" (*final and binding*).[44] Konteks final dan mengikat ini tidak bisa terlepas dari sifat *erga omnes* yang melekat pada putusan PTUN itu sendiri sebagai kekuatan hukum yang mengikat bagi siapapun, tidak hanya yang berperkara. Secara refleksif, maka hal ini sejatinya semakin memperkuat konsekuensi, akibat hukum, dan kekuatan hukum dari putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu sehingga sama sekali tidak dibenarkan dilakukannya upaya hukum.

Kendati demikian, praktik empiris pengajuan upaya hukum terhadap Putusan PTUN Jakarta dalam sengketa proses Pemilu yang terjadi dewasa ini sesungguhnya menimbulkan pertanyaan besar dan mendasar yang perlu dikritisi. Jika melihat pada praktik empiris pengajuan upaya hukum PK oleh ketiga Partai Politik sebagaimana yang telah diuraikan, terlihat bahwa frasa "*tidak dapat diajukan upaya hukum lain*" dalam Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu dengan penjelasan yang dikatakan "cukup jelas" rupanya ditafsirkan secara bebas sebagai tidak ada upaya hukum banding dan kasasi sebagai upaya hukum biasa, lalu menafsirkan tersedianya upaya hukum istimewa berupa peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan

[44] Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011.

hukum tetap.[45] Dalam konteks ini, Pemohon PK mendasarkan permohonannya pada **Pasal 67** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,[46] dan juga **Pasal 132** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.[47]

Praktik empiris pengajuan upaya hukum PK terhadap Putusan PTUN Jakarta dalam sengketa proses Pemilu tersebut, sesungguhnya memperlihatkan adanya suatu celah hukum yang kemudian dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan PK, yaitu ketidaktegasan frasa "*tidak dapat diajukan upaya hukum lain*" dalam Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu dan ketidakjelasannya yang dalam penjelasan Pasal-nya malah dikatakan "cukup jelas". Artinya, ketidaktegasan dan ketidakjelasan dari norma pengaturan mengenai sifat final dan mengikatnya putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu

---

[45] Memori PK dari Pemohon PK Partai Masyumi pada perkara Sengketa Proses Pemilu Nomor 4/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2023, hlm. 5.

[46] Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan alasan-alasan dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, (b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, (c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, (d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, (e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*"

[47] Selengkapnya, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "*terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*".

dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana tersebut, memiliki implikasi yang berarti dalam praktiknya, yaitu yang dalam konteks ini akhirnya dikesampingkan oleh Pemohon PK dengan mendasarkan permohonannya pada Pasal lain dalam Undang-Undang yang lain pula.

Terhadap hal tersebut, jika ditarik ke dalam hubungan umum-khusus dalam penerapan suatu undang-undang, menjadi menarik untuk dikaji apakah dalam konteks ini relevan diterapkannya *asas lex specialis derogat legi generali* yang secara konseptual Bagir Manan telah memberikan pedoman dalam penerapannya, yaitu sebagai berikut: (1) ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, (2) ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya undang-undang dengan undang-undang), dan (3) ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.[48]

Mengacu pada pedoman penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* tersebut, jika dikontekstualisasikan dengan praktik empiris pengajuan upaya hukum PK terhadap putusan PTUN Jakarta dalam sengketa proses Pemilu, memang di satu sisi terlihat bahwa ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan khusus. Artinya, penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang

[48] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 56. Lihat juga dalam Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, *Volume 16*, *Nomor 3*, *September 2020*, hlm. 314.

bersifat umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut.[49] Secara konkrit dapat dibenarkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku sebagai norma hukum umum yang memberikan arahan dalam pengajuan upaya hukum PK pada sengketa-sengketa tata usaha negara. Akan tetapi di sisi lain, apakah dibenarkan jika sengketa tata usaha negara Pemilu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu kemudian dikesampingkan batasan-batasan pengaturannya, sebagaimana terlihat dalam praktiknya dimana batasan pengajuan upaya hukum apapun (termasuk PK) terhadap putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu kemudian dikesampingkan dan ditarik ke dalam aturan yang bersifat umum.

Secara logika sederhana, praktik demikian tentu saja sama sekali tidak dapat dibenarkan karena yang sesungguhnya terjadi adalah norma hukum yang umum malah mengesampingkan norma hukum yang khusus. Terlebih lagi dalam konteks penyelesaian sengketa proses Pemilu di pengadilan tata usaha negara, telah dibentuk suatu peraturan yang lebih khusus lagi sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 yang mana melalui Pasal 13 ayat (5) secara tegas melarang dilakukannya upaya hukum apapun (termasuk PK) terhadap putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu, yang berbunyi: "*Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali*". Artinya, ketidaktegasan dan ketidakjelasan norma pengaturan dalam undang-undang pemilu mengenai sifat final dan mengikatnya putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu, sejatinya telah dipertegas dan diperjelas melalui PERMA 5/2017, sehingga seharusnya ketentuan

[49] Nurfaqih Irfani, *Ibid*.

norma hukum yang khusus ini selain menjadi pedoman khusus, juga harus menjadi sarana untuk dapat menyeragamkan pemahaman dari seluruh *stakeholder* Pemilu terhadap sifat final dan mengikatnya putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu beserta konsekuensi hukum dan ketidakmungkinan dilakukannya upaya hukum apapun terhadapnya.

Kesimpulan

Dari serangkaian diskursus pembahasan yang telah disajikan, terlihat bahwa dari ketentuan normatif Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 disandingkan dengan makna etimologis dan terminologis sifat final dan mengikat suatu putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa makna putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu yang dikehendaki bersifat final dan mengikat, memiliki konsekuensi yuridis langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh setelahnya, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Terlebih dengan melekatnya sifat *erga omnes* pada putusan PTUN itu sendiri sebagai kekuatan hukum yang mengikat bagi siapapun, tidak hanya yang berperkara, semakin memperkuat konsekuensi, akibat hukum, dan kekuatan hukum dari putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu, sehingga sama sekali tidak dibenarkan dilakukannya upaya hukum apapun termasuk Peninjauan Kembali.

Selanjutnya, dari praktik empiris diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan PTUN Jakarta dalam sengketa proses Pemilu yang terjadi dewasa ini, terlihat adanya suatu celah hukum yang kemudian dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu ketidaktegasan frasa "*tidak dapat diajukan upaya hukum lain*" dalam Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu dan

ketidakjelasannya yang dalam penjelasan Pasal *a quo* hanya dikatakan "cukup jelas". Sebagai sebuah refleksi kritis, dapat disimpulkan bahwa ketidaktegasan dan ketidakjelasan norma pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu tersebut memiliki implikasi yang berarti dalam praktik penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN Jakarta. Namun demikian, dengan penegasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, terdapat harapan untuk dapat menyeragamkan pemahaman dari seluruh *stakeholder* Pemilu mengenai sifat final dan mengikatnya putusan PTUN dalam sengketa proses Pemilu, beserta konsekuensi hukum dan ketidakmungkinan dilakukannya upaya hukum apapun termasuk Peninjauan Kembali.

Dalam rangka perbaikan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa-masa yang akan datang, secara khusus artikel ini menyarankan dilakukannya revisi terhadap Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu, khususnya terhadap frasa "*tidak dapat diajukan upaya hukum lain*", untuk lebih mempertegas sifat final dan mengikat serta larangan dilakukannya upaya hukum apapun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

Buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pemilihan Umum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004.

Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2001).

Fajar Laksono, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesia Administrative Law*)", (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Puslitbang Kejagung RI, 2006).

Jurnal :

Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial, Volume 14, Nomor 3, Desember 2021*.

Irhamto, dkk., "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Agung terhadap Diterima dan Dikabulkannya Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016 serta Penerapan Upaya Hukum Keputusan Fiktif Positif di PTUN dikaitkan dengan Implikasinya terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 8, Nomor 1, Maret 2023*.

Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009*.

M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015*.

Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 3, September 2020*.

Widodo Ekatjahjana, "Mencermati Ratio Decidendi MK dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN", *Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010*.

Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi, "Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum", *Jurnal APHTN-HAN Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022*.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah :

Ristu Darmawan, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Internet :

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, http://192.168.1.200/SIPP32/login, (diakses pada 31 Agustus 2023).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 455/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2023.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2023.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 2 Februari 2023.

Sumber Lainnya :

Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan tentang DKPP untuk Penegakan Hukum", disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013.

Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Partai Rakyat Adil Makmur yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023.

Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Partai Keadilan dan Persatuan yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023.

Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Partai Masyumi yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023.